

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. W. Widjaja, 2016, "*Administrasi Kepegawaian*", Rajawali, Jakarta.
- Ajib Rakhmawanto, 2015, "*Penetapan Standar Kinerja Jabatan Administrasi Aparatur Sipil Negara*", Pusat Kajian dan Penelitian Kepegawaian, Jakarta.
- Ani Purwati, 2020, "*Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*", Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Frans Satrio Wicaksono, 2009, "*Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*", Visimedia, Jakarta.
- Fredrik J Pinakunary, 2020, "*Ombudsman RI dan Tugasnya Terkait Maladministrasi*", FJP Law Offices Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Perihal Undang-Undang*", Konstitusi Press, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, "*Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Materi Muatan*", Kanisius, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Muhammad Taufiq, 2017, "*Etika Profesi dan Rangkap Jabatan ASN*", Deputy Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2020, "*Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*", Nusa Media, Bandung.
- Nisa Agistina Rachman dan Antonius Galih Prasetyo, "*Rangkap Jabatan ASN Dan Komisaris BUMN: Perspektif Konflik Kepentingan*", 2017, Cetakan Pertama Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2019, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Rahayu Hartini, 2017, "*BUMN Persero Konsep Keuangan Negara*", Setara Press, Malang.

- Rai Matili, 2012, *"Perseroan Terbatas Menurut 3 Undang-Undang"*, Keni Media, Bandung.
- Refly Harun, 2019, *"BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara"*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sastra Djatmika, 2009, *"Hukum Kepegawaian di Indonesia"*, Djambatan, Bandung.
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2017, *"Perlindungan Hukum Bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan Pemerintahan"*, Lembaga Administrasi Negara Deputy Bidang Kajian Kebijakan, Jakarta.
- Tri Wahyuni, 2020, *"Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum Dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah"*, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lan, Jakarta.
- Zaman Hadi, 2011, *"Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham"*, UB Press, Malang.

Jurnal

- Abdul Rahman, 2019, *"Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance"*, Jurnal Konstituen, Volume 1 Nomor 1, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang.
- Adrie, 2019, *"Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil"*, Jurnal Yustitia, Volume 13 Nomor 1, Universitas Ngurah Rai, Bali.
- Ahmad Gelora Mahardika, 2020, *"Rekontruksi Syarat Pengangkatan Jabatan Komisaris BUMN"*, Jurnal Hukum Nasional, Volume 50 Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung.
- Ahmad Wahyudi, 2023, *"Problematika Rangkap Jabatan ASN Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara"*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume 5 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Diasa Ines Wishesa, 2020, *"Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit"*, Juris Diction, Volume 3 Nomor 5, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Endang Komara, 2019, *"Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia"*, Jurnal Indonesia, Universitas Indonesia, Bandung, Volume 4 Nomor 1.
- Eko Priyono, 2020, *"Doktrin Bussiness Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Direksi BUMN"*, Jurnal Hukum dan

- Kesejahteraan, Volume 8 Nomor 2, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.
- Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada, 2021, "*Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara*", Jurnal Kertha Negara, Volume 9 Nomor 3, Universitas Udayana, Bali.
- Inche Sayuna, 2020, "*Harmonisasi dan Sinkronisasi Terkait Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori*", Jurnal Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Marchella Setiawan, 2018, "*Pengaturan Aparatur Sipil Negara Eselon I Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris di BUMN*", Jurnal Kertha Negara, Volume 6 Nomor 3, Universitas Udayana, Bali.
- Muhammad Nizamuddin Sidqi, 2021, "*Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara*", Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Nisa Agistiani, 2022, "*Rangkap Jabatan ASN dan Komisaris BUMN: Perspektif Konflik Kepentingan*", Jurnal Mercubuana, Volume 2 Nomor 3, Universitas Mercubuana, Jakarta.
- Putu Pradiva Putra Salain, 2021, "*Studi Eksplorasi Dampak Work From Home Pada Kinerja Karyawan BUMN di Masa Pandemi*", Jurnal Satyagraha, Volume 03 Nomor 2, Universitas Mahasarawati Denpasar.
- Putu Samawati, 2017, "*Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur dalam Sebuah Perseroan Terbatas*", Jurnal Ilmiah Hukum Simbur Cahaya, Volume 24 Nomor 3, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Retno Saraswati, 2009, "*Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", Jurnal Media Hukum, Volume 9 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rika Anggun Tiara, 2022, "*Penerapan Aturan Hukum Terkait Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Umum Pada BUMN*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Risky Dian Novita, 2022, "*Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang – Undangan*", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 2, Universitas Brawijaya, Malang.

Riris Katharina, 2018, “*Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara*”, Jurnal Spirit Publik, Volume 13 Nomor 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Solechan, 2019, “*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*”, Jurnal Administrasi Hukum dan Pemerintahan, Volume 2 Nomor 3, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan – Peraturan Lainnya

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Website

Dicky Setya Prayogo, “*Aspek Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di Perseroan Tertinggi dan BUMN*”, <https://artikata.com/arti-346968-rangkap.html>, tanggal akses 20 Mei 2023.

Dian Dewi Purnamasari, “*Bahaya di Balik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN*”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/03/bahaya-di-balik-rangkap-jabatan-komisaris-bumn>, tanggal akses 16 Desember 2023.

Dwi Aditya Putra, “*Ramai Rangkap Jabatan Pada BUMN*”, <https://tirto.id/ramai-rangkap-jabatan-irjen-kemenkeu-resmi-jabat-komisaris-bri-gDuN>, tanggal akses 17 Agustus 2024.

Ethics Unwrapped, “*Konflik Kepentingan*”, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>, tanggal akses 21 Mei 2023.

Hukum Online, “*Simalakama Rangkap Jabatan: Mengawal Kepentingan Pemerintahan dan Potensi Korupsi*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/simalakama-rangkap-jabatan-->

mengawal-kepentingan-pemerintah-dan-potensi-korupsi-lt59100ecb7504f/?page=all# , diakses 20 Juli 2024.

HUMAS Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Peran Ombudsman dalam Peningkatan Pelayanan Publik*” , <https://setkab.go.id/peran-ombudsman-ri-dalam-peningkatan-pelayanan-publik/> , diakses tanggal 15 Juli 2024.

Indonesia Corruption Watch, “*Konflik Kepentingan: Rangkap Jabatan*”, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW%20Rangkap%20Jabatan.pdf> , diakses 20 Juli 2024.

Komisi Aparatur Sipil Negara, “*Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara 2018*”, <http://www.kasn.go.id/> , tanggal akses 4 Januari 2024.

Ombudsman Republik Indonesia, “*Temukan 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan dan Penghasilan, Ombudsman Surati Jokowi*”, <https://www.ombudsman.go.id/news/r/temukan-397-komisaris-bumn-rangkap-jabatan-dan-penghasilan-ombudsman-surati-jokowi#:~:text=Berdasarkan%20jabatan%2C%20rekam%20jejak%20karir%20dan%20pendidikan%20ditemukan,sesuai%20kompetensi%20teknis%20dengan%20BUMN%20dimana%20mereka%20ditempatkan> , tanggal akses 01 Juli 2024.

Sholahuddin Al Ayyubi, “*Penetapan Tersangka Baru Kasus Jiwasraya*”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200624/16/1257178/penetapan-tersangka-baru-kasus-jiwasraya>, tanggal akses 07 Juni 2023.

Yeka Hendra Fatika, “*Soal Maladministrasi Rangkap Jabatan BUMN, Ombudsman RI Menjadi Sorotan*”, <https://ombudsman.go.id/news/r/soal-maladministrasi-rangkap-jabatan-bumn-ombudsman-ri-masih-menjadi-sorotan>, tanggal akses 13 Mei 2023.

Zamzami Ali, “*Rangkap Jabatan BUMN, Pengabaian Terhadap Undang – Undang*”, <https://aspek.id/rangkap-jabatan-bumn-pengabaian-terhadap-undang-undang/> , tanggal akses 17 Desember 2023.